

BAB I

PENDAHULUAN

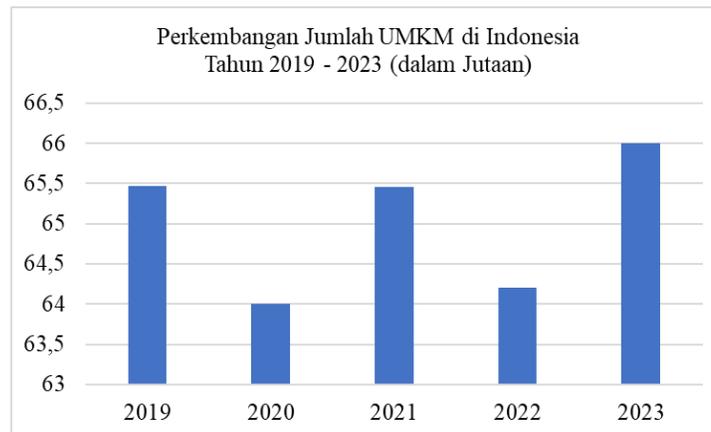
1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan ekonomi yang berdiri sendiri dan berskala kecil serta dikelola oleh kelompok masyarakat atau kumpulan orang yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memegang peran penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia baik ditinjau dari tingkat penciptaan lapangan kerja maupun tingkat kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan Kementerian Koperasi dan UKM, sampai tahun 2023, jumlah UMKM saat ini mencapai 66 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61% atau senilai Rp9.580 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia juga ditunjukkan melalui kemampuannya menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada. Pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah pada tahun 2020 sempat minim di angka -5,91 persen. Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah meningkat di angka 4,98 persen (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, 2022).

UMKM sebagai pilar dalam perwujudan ekonomi yang berwawasan kemandirian mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan dengan usaha

besar lainnya. Keunggulan UMKM mencakup kemampuan untuk berinovasi dalam pengembangan produk, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, serta memiliki fleksibilitas dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan pasar yang lebih cepat dibandingkan usaha besar. Selain itu, UMKM memiliki tingkat fleksibilitas dan adaptabilitas yang tinggi. UMKM cenderung lebih fleksibel dalam merespon perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. Hal ini dapat dilakukan seperti misalnya mengubah arah bisnis, mengembangkan produk baru, atau menyesuaikan strategi dengan lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan besar yang memiliki struktur birokrasi yang kompleks. UMKM yang beroperasi di tingkat lokal atau regional memiliki pemahaman yang baik terhadap kebutuhan pasar setempat dan dapat menyediakan produk atau layanan yang lebih sesuai. Ukuran yang lebih kecil memungkinkan UMKM untuk lebih mudah berinovasi dan menciptakan hal-hal baru mengikuti perkembangan zaman tanpa terjebak dalam struktur organisasi yang besar.

UMKM memainkan peran penting dalam meratakan distribusi ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial dengan menciptakan peluang usaha dan pekerjaan di berbagai daerah. Hal ini tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada pembangunan yang inklusif. Dengan memanfaatkan keunggulan-keunggulan tersebut, UMKM dapat berkembang menciptakan nilai tambah bagi ekonomi dan menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara.



Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM RI (2024)

Gambar 1. 1 Data Pertumbuhan UMKM 2019 – 2023

Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang positif dalam perekonomian. Dari data yang tersedia, jumlah UMKM terus meningkat secara konsisten dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, jumlah UMKM mencapai 65,47 juta unit, kemudian tahun 2020 jumlahnya menjadi 64 juta unit, dan terus bertambah pada tahun 2021. Perkembangan jumlah UMKM terus berlanjut, pada tahun 2023, jumlah UMKM mencapai 66 juta unit UMKM atau meningkat sebesar 1,5% dari tahun sebelumnya. Penambahan jumlah UMKM dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa sektor UMKM memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan. Hal ini mencerminkan dorongan dan dukungan yang diberikan baik dari pemerintah maupun masyarakat dalam mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dengan pertumbuhan yang berkelanjutan ini, diharapkan UMKM dapat terus berperan

dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penciptaan lapangan kerja serta pengentasan kemiskinan.

Perkembangan UMKM di Indonesia yang semakin pesat disebabkan oleh beberapa faktor penunjang seperti kemajuan teknologi informasi, kebijakan pemerintah, akses peminjaman modal usaha yang mudah, dan masih banyak lagi. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan oleh UMKM sebagai alat untuk memperluas jangkauan pasar sehingga memudahkan konsumen dalam memperoleh produk atau layanan. Kebijakan pemerintah memiliki peran yang sangat penting sebagai faktor pendorong perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, seperti misalnya melalui program pembiayaan dan kredit, pelatihan dan pendampingan, peningkatan infrastruktur dan akses pasar, serta perlindungan hukum bagi pelaku UMKM. Faktor berikutnya yang mendorong perkembangan UMKM adalah kemudahan peminjaman modal usaha. Diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia No. 17 Tahun 2015 yang mewajibkan bank umum menyalurkan 20% dari total kreditnya kepada UMKM dengan kualitas kredit yang terjaga, menjadikan peluang para pelaku UMKM untuk mendapatkan tambahan modal semakin terbuka. Dengan adanya tambahan modal yang diperoleh, diharapkan pelaku usaha dapat meningkatkan kapasitas produksi sehingga membuka peluang untuk pertumbuhan dan pengembangan usaha yang lebih lanjut.

Dalam rangka pengembangan UMKM, pemerintah mencanangkan program-program yang mendukung kemajuan UMKM seperti program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), tetapi realitanya masih banyak UMKM yang gagal berkembang. Kegagalan ini terjadi akibat kurangnya kemampuan pelaku usaha dalam menyediakan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) (Amalia dkk., 2023).

Lembaga keuangan sebagai penyedia peminjaman modal usaha akan melakukan seleksi yang ketat terhadap calon peminjam untuk mengurangi risiko peningkatan angka kredit bermasalah (*non-performing loan/NPL*). Dalam rangka memastikan bahwa kredit yang diberikan pada UMKM suatu saat akan dilunasi, maka pihak lembaga keuangan akan meminta laporan keuangan usaha untuk menilai kelayakan usaha atas pengajuan kredit yang diajukan oleh UMKM. Kondisi tersebut akan menuntut UMKM untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) guna mencegah terjadinya asimetri informasi antara kedua pihak tersebut. Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) adalah standar akuntansi independen yang tidak mengacu pada SAK Umum. SAK ETAP menggunakan konsep biaya historis, mengatur transaksi yang dilakukan oleh ETAP, dan memiliki pengaturan akuntansi yang lebih sederhana

serta relatif tidak berubah selama beberapa tahun (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2016).

Pada dasarnya, UMKM tidak memiliki kewajiban dalam melakukan penyusunan dan menyajikan laporan keuangan. Akan tetapi, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit oleh Bank Umum mensyaratkan kepada calon debitur untuk menyusun informasi keuangan yang dianggap berkualitas untuk dianalisis kelayakan usahanya oleh pihak kreditur. Dengan adanya laporan keuangan sebagai syarat pengajuan pendanaan, UMKM memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyajikan informasi keuangan yang berkualitas sesuai dengan SAK ETAP. Karakteristik kualitatif pokok laporan keuangan yang ada pada SAK ETAP yaitu (1) Relevan; (2) Andal; (3) Dapat dibandingkan; (4) Dapat dipahami.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Amalia dkk. (2023) UMKM masih terkendala dalam penyusunan laporan keuangan hingga saat ini. Tantangan utama dari kondisi tersebut adalah sulitnya mencatat pengeluaran dan pemasukan uang dalam pembukuan usaha. Kesenjangan informasi yang timbul akibat penyusunan laporan keuangan akan memberikan dampak buruk bagi perkembangan UMKM, yaitu produktivitas usaha menjadi rendah karena minimnya modal. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya pembukuan transaksi dalam usaha yang dijalankan menjadi penyebab

kegagalan UMKM. Lembaga keuangan memerlukan informasi keuangan yang baik sebagai bentuk mitigasi risiko usaha (debitur) di masa yang akan datang.

Kualitas laporan keuangan dapat ditunjang melalui faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti pemahaman akuntansi, tingkat pendidikan dan ukuran usaha. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Lestari (2023) mengenai pengaruh tingkat pendidikan, pemahaman akuntansi, pelatihan penyusunan laporan keuangan, dan ukuran usaha terhadap pelaporan keuangan UMKM berdasarkan SAK ETAP yang memberikan hasil berupa tingkat pendidikan, pemahaman akuntansi, dan ukuran usaha berpengaruh positif terhadap pelaporan keuangan, sedangkan pelatihan penyusunan laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap pelaporan keuangan UMKM berdasarkan SAK ETAP.

Berdasarkan riset terdahulu membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan memberikan hasil yang beragam. Pemahaman akuntansi diduga dapat mempengaruhi persepsi pemilik ataupun pengelola UMKM terkait pentingnya kualitas laporan keuangan dalam perkembangan usaha. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari dkk. (2023) dan Astuti & Khair (2023), menyatakan bahwa pemahaman akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian yang sejalan juga dikemukakan oleh Erawati & Setyaningrum (2021) bahwa variabel pemahaman akuntansi memiliki

pengaruh yang besar terhadap kualitas laporan keuangan dikarenakan setiap pelaku usaha yang memiliki pemahaman akuntansi yang cukup baik, maka pelaku usaha tersebut akan membuat sebuah laporan keuangan. Hasil penelitian yang berbanding terbalik ditunjukkan oleh Abidin (2021) yang mendapatkan hasil bahwa adanya hubungan negatif antara pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Perbedaan tersebut menjadikan dasar pentingnya pembahasan lanjutan sehingga perlu diteliti lebih lanjut dan berakibat pada perbedaan pemahaman akuntansi pemilik usaha yang dimiliki tiap seseorang.

Tingkat pendidikan juga menjadi salah satu faktor yang diduga dapat mempengaruhi persepsi pemilik UMKM terkait pentingnya kualitas laporan keuangan bagi tumbuh dan berkembangnya usaha. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan meningkatkan kemampuan pengetahuan baru. Tingkat pendidikan diuji melalui penelitian yang dilakukan oleh Malinowski & Porzuczek (2020) dan Abidin (2021) menyatakan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hal itu selaras dengan penelitian Arisandi dkk. (2022) yang menyimpulkan bahwa dengan memiliki pendidikan yang baik dapat membawa pengaruh terhadap kinerja pelaku usaha untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaannya. Dengan memiliki tingkat pendidikan yang memadai, pelaku UMKM akan dapat memiliki wawasan dan keterampilan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Hasil penelitian berbanding terbalik dengan penelitian Aroginanto

dkk. (2023) yang menyatakan bahwa tingkatan pendidikan yang tinggi tetapi tidak adanya latar belakang akuntansi, maka akan mempengaruhi persepsi pelaku usaha bahwa proses pembukuan tidak penting dilakukan yang berakibat menurunnya kualitas laporan keuangan. Perbedaan hasil penelitian tersebut memerlukan penelitian dan pembahasan lebih lanjut pada tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pelaku usaha khususnya UMKM.

Faktor selanjutnya yang diduga dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh UMKM adalah ukuran usaha. Ukuran usaha merupakan faktor yang sulit dipisahkan dengan lingkungan pelaku usaha. Ukuran usaha dapat mempengaruhi pemikiran pelaku UMKM mengenai kerumitan dan semakin tingginya tingkat transaksi perusahaan. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Lestari & Priyadi (2017) yang membahas faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan berbasis SAK-ETAP pada UMKM di Surabaya. Salah satu hasil dari penelitian tersebut adalah ukuran usaha berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan UMKM. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa semakin besar ukuran sebuah usaha, maka semakin rumit penerapan akuntansi hingga menghasilkan informasi keuangan usaha agar memiliki akses lebih besar dan lebih luas. Ukuran usaha merupakan skala yang mengategorikan ukuran sebuah usaha berdasarkan faktor seperti jumlah tenaga kerja dan nilai penjualan. Hasil penelitian berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Cholis (2022)

bahwa ukuran usaha tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan UMKM. Perbedaan hasil penelitian tersebut memerlukan penelitian dan pembahasan lebih lanjut mengenai pengaruh ukuran usaha terhadap kualitas laporan keuangan pada UMKM.

Berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu yang membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan, peneliti tertarik untuk menguji lebih lanjut mengenai faktor yang memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Tingkat Pendidikan, dan Ukuran Usaha Terhadap Kualitas Laporan Keuangan UMKM Di Kota Surakarta”**. Hal ini dikarenakan adanya inkonsistensi hasil penelitian yang telah dilakukan para peneliti sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman akuntansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan UMKM di Kota Surakarta?
2. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan UMKM di Kota Surakarta?
3. Apakah ukuran usaha berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan UMKM di Kota Surakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan UMKM di Kota Surakarta.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan UMKM di Kota Surakarta.
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran usaha secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan UMKM di Kota Surakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan menjadi bahan pertimbangan terhadap hasil penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pengaruh pemahaman akuntansi, tingkat pendidikan, dan ukuran usaha terhadap kualitas laporan keuangan UMKM. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan Teori *Enterprise* dan Teori Agensi terkait UMKM, serta sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan, wawasan, dan pengalaman terkait UMKM, terutama dalam pemahaman akuntansi, tingkat pendidikan, ukuran usaha, dan kualitas laporan keuangan UMKM.
- b. Bagi UMKM dan Masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi tambahan mengenai kualitas laporan keuangan dan membantu meningkatkan pemahaman akuntansi, serta sebagai bahan evaluasi untuk menyusun laporan keuangan yang lebih baik.
- c. Bagi Pemerintah, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dinkop UKM), penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan referensi dalam merancang kebijakan dan mengambil keputusan sebagai upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan UMKM.